BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Koran Tempo
Subyek : Sumur Bor
Edisi : 09 Mei 2008
Halaman : A15

Sumur Bor Ilegal Disegel

“Sudah kami urus izinnya, tapi belum selesai juga."

JAKARTA -- Pemerintah DKI Jakarta kemarin merazia sumur-sumur bor milik gedung-gedung pencakar langit sepanjang Jalan Jenderal Sudirman-M.H. Thamrin, Jakarta. Dalam operasi itu, sebuah sumur bor di kompleks Grand Indonesia, Jakarta Pusat, disegel.

“Penggunaan sumur (yang disegel) itu ilegal karena izinnya kedaluwarsa,” kata Kepala Subdinas Pengendalian Pertambangan DKI Jakarta Imam Sudjono kepada *Tempo* saat memimpin razia itu.

Imam memberi batas waktu hingga akhir Mei ini kepada pengelola untuk mengurus kembali izin tersebut. “Kalau lewat, sumur akan kami cor dengan semen,” katanya.

Penyegelan berlangsung setelah tim yang dipimpin Imam bertemu dengan pengelola Grand Indonesia. Dalam pertemuan itu, tim dari DKI yang berjumlah sekitar 20 orang meminta semua surat-surat izin air tanah, genset, neraca penggunaan air, dan Analisis Dampak Lingkungan yang dimiliki pengelola.

Kecurigaan tim mulai timbul saat pengelola hanya bisa menunjukkan tiga Surat Izin Penggunaan Air Tanah dari lima sumur bor yang dimiliki. “Satu sumur tidak kami segel karena memang rusak lama,” kata Imam.

Sempat terjadi silat lidah dalam pertemuan itu. Pengelola beralasan penggunaan sumur-sumur itu sah. Setelah surat izin ditunjukkan, akhirnya diketahui surat izin untuk sumur bor nomor 1 sudah kedaluwarsa sejak 1999.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan pajak dan pemanfaatan air tanah, setiap bangunan yang akan memanfaatkan air tanah harus mendapat izin dari Dinas Pertambangan.

Manager Engineering & Maintenance Grand Indonesia Slamet Ristono mengemukakan banyak surat-surat izin yang belum dipegang oleh pihaknya karena pengelolaan gedung baru saja beralih. Ia juga beralasan sumur bor yang disegel dan yang rusak adalah sumur bor lama milik Hotel Indonesia (sebelum Grand Indonesia). “Sudah kami urus izinnya, tapi belum selesai juga,” katanya.

Sumur itu, kata Slamet, masih sering digunakan untuk mengisi kebutuhan cadangan air. Setiap bulan, kompleks yang terdiri atas perkantoran, mal, hotel, dan apartemen itu membutuhkan air sekitar 50 ribu meter kubik. Sekitar 95 persen kebutuhan air dipasok dari Perusahaan Air Minum. “Kami juga menggunakan air olahan limbah untuk kebutuhan lain,” katanya kepada *Tempo*.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Selain menyegel sumur bor, DKI juga mengancam akan menyegel semua sumur bor milik Grand Indonesia karena tidak memiliki sumur pantau. Kepala Seksi Konservasi Dinas Pertambangan DKI Jakarta Heni Suharni mengatakan, sumur pantau ini berfungsi untuk menunjukkan ketinggian permukaan air tanah dan banyaknya air tanah yang diambil. “Kalau (itu) tidak ada, tidak bisa diketahui berapa jumlah eksploitasi air tanah,” katanya.

Untuk itu, Slamet berjanji akan membuat sumur pantau paling lama dua minggu ke depan. “Kami usahakan,” katanya.

Kasus pengambilan air tanah tanpa izin terus meningkat setiap tahun. Pada 2004, hanya ada 400 sumur ilegal yang disegel. Pada 2007, penyegelan dilakukan terhadap 1.700 sumur ilegal di seluruh wilayah Jakarta. **Mustafa Silalahi**

.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup